Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M

Alifa Cholifiah, Anwar Sanusi, Aditia Muara Padiatra
Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuludin dan Adab
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email : alifacholifiah2000@gmail.com, anwarsanusiasnaf@gmail.com, aditiamuara@syekhnurjati.ac.id

Abstract

Spices and Ports are two things that cannot be separated in the commercial transformation that occurred centuries ago. The two are related to each other and form a knot that is interdependent and gives rise to various reactions and ambitions that occur among every noble and ruler who wants to control commerce. This is also related to various trading ports in Indonesia such as Sriwijaya, Pasai, and Malacca. The fall of Malacca into the hands of the Portuguese resulted in a shift in trade routes directed to the Red Sea, this was seriously used by the Sultanate of Aceh Darussalam to seize international scale trade. So this research aims to present a reconstruction of maritime trade routes that occurred in the territory of the Sultanate of Aceh Darussalam so that it discusses trade routes, commodities and even payment instruments used in each of these periods and how the policies of each sultan/ah in the Aceh Darussalam Sultanate towards trade routes maritime events that occurred in the 17th century AD. The research method used is the historical research method which consists of 4 stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This research resulted in the trading routes of the Sultanate of Aceh Darussalam, trade commodities such as pepper, oil, tin, policies and regulations that apply in regulating trade mobility including means of payment in the form of deureuham, ketun, and Spanish ringgit as well as the role of the sultan/ah in establishing trade policies to obtain a lot of advantages such as rising pepper prices (Iskandar Muda era), diplomacy with England (during Al-Mukamil), tin monopoly on silver (during Sultanah Safiatuddin's time).

Keywords: *Aceh Darussalam, Commerce, Maritime, Sultan/ah*

Pendahuluan

Pergerakan dan perputaran roda perniagaan rempah sudah dimulai sejak zaman dahulu. Mengalami banyak perkembangan dan perubahan dalam prosesnya serta kebaharuan informasi dari adanya tempat baru yang diyakini sebagai penghasil rempah dengan kualitas terbaik tentu menjadi hal yang menarik untuk diungkap. Berkaitan dengan kekuatan Migrasi Eropa barat kristen ke timur muslim menjadikan wilayah Nusantara kerap menjadi sasaran dari target monopoli bangsa barat. Pembagian wilayah yang disinyalir menjadi cikal bakal terjadinya arus perniagaan yang semakin kencang membuat Nusantara ramai dikunjungi oleh para pedagang asing. Raja Spanyol memerintahkan Portugis untuk menelusuri kekayaan rempah di wilayah Afrika.

Nusantara masuk dalam rute perniagaan, jauh sebelum itu. Beberapa abad sebelumnya, Sriwijaya sudah menjadi tombak perniagaan penting yang menjadikannya sebagai wilayah tempat singgah kapal-kapal asing yang akan

menuju India/Cina. Di sisi lain, orang-orang India sudah menguasai rute perjalanan untuk mencapai Nusantara, dalam hal ini Kepulauan di Maluku dan Selat Malaka. Ekspedisi ini yang menjadikan terbentuknya simpul jalur rempah sebagai jalur perniagaan internasional.

Rempah dan pelabuhan menjadi kunci dalam perniagaan pada zaman dahulu termasuk didalamnya mengenai mata uang yang berlaku dalam perniagaan, komoditi rempah yang menjadi rebutan, serta jalur-jalur rempah yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain dalam rangka perniagaan rempah dna kepentingan ekonomi yang menjanjikan.

Bukti perniagaan laut dapat dilihat dari penemuan kapal-kapal kuno yang berkisar tenggelam pada tahun 1522-1800 di Nusantara. Terdapat berbagai temuan komoditas perniagaan didalamnya berupa sutra dan the (Cina), Katun (Amerika dan Cina), berbagai logam eropa, dan lain sebagainya. Kebanyakan hancur tapi ada yang bisa diselamatkan dan menjadi pameran jalur rempah yakni emas, perak berlian zamrud, mutiara, batu berharga, porselen, keramik dari Cina dan Jepang.[1]

Kelompok dagang asia terbagi menjadi saudagar kaya si pemilik modal dan para pedagang keliling yang ikut menumpang di kapal untuk mennjajakan dagangannya. *Commenda* merupakan sistem dagang dimana pada saat itu para raja-raja menyimpan saham mereka dalam perahu yang berlayar. Contohnya raja-raja dari Pahang yang memiliki kantor dagang di Malaka. Emporium membuat jalur pelayaran menjadi lebih pendek, pedagang dari Cina tidak perlu berlayar sampai ke Timur Tengah, mereka hanya cukup sampai di Malaka, dan sebaliknya juga para pedagang dari Timur Tengah.[2] Tak mengherankan apabila Malaka menjadi pusat perhatian bagi perniagaan jalur maritim internasional. Letaknya yang berada diantara Pulau Sumatera dan Semenanjug Melayu menjadikan wilayah selat Malaka berada dalam garis *energy lifeline* sehingga dapat menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Asia.[3] Keberadaan Malaka bukan menyoal strategis bagi negara terdekat namun juga bernilai bagi negara-negara pengguna seperti China, Korea, Jepang, Filipina, Negara Timur Tengah dan Negara lainnya.[4]

Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Malaka pada saat itu mampu menyaingi pasar Pasai. Strategi yang dilakukan oleh Parameswara sebagai penguasa Malaka ialah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan stok perniagaan dan menyebar duta persahabatan ke berbagai wilayah untuk menjamin stok barang

[1] Anastasia Wiwik Swastiwi, "Jejak Jalur Rempah Di Kepulauan Riau," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (November 15, 2021), https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.251.

[2] Yanwar Pribadi, "ERA NIAGA DI NUSANTARA PADA MASA KERAJAAN ISLAM +1500-1700 M," *ALQALAM* 22, no. 1 (April 29, 2005): 65, https://doi.org/10.32678/alqalam.v22i1.1448.

[3] U Nurmina, "Politik Maritim Indonesia Di Selat Malaka (Studi Terhadap Penanganan Permasalahan Piracy)" (Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2018).

[4] Wiwik Swastiwi, "Jejak Jalur Rempah Di Kepulauan Riau."

naiga dari setiap daerah tetap terkendali sehingga kegiatan berniaga di Malaka dapat berjalan dengan teratur.[5] Selain itu, ekspedisi militer juga dilakukan ke berbagai wilayah kekuasaan Malaka untuk memberantas bajak laut yang dapat mengganggu mobilitas perniagaan.

Perkembangan Malaka sebagai penguasa perniagaan tidak dapat bertahan lama karena terus mengalami penyerangan dari Portugis. Sehingga kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada 1511 M menyebabkan banyak perubahan terjadi pada perniagaan saat itu. Kerajaan Demak menjadi salah satu pihak yang dirugikan karena atas peristiwa ini, ia harus menelan kerugian besar akibat beras yang diekspornya ke Malaka mengalami perubahan jumlah pembeli karena sudah tidak banyak pedagang yang singgah ke Malaka lagi. Sebenarnya, kejatuhan Malaka ke tangan Portugis tidak terlalu memberikan keuntungan yang berarti bagi bangsa Portugis sebab Malaka hanya sebagai pusat pelabuhan transit pedagang yang berasal dari berbagai wilayah, namun sekali lagi Malaka bukan sebagai wilayah yang memproduksi bahan baku komoditas dari perniagaan yang ada di pasaran. Sehingga para pedagang yang berasla dari daerah produksi komoditas dapat sesuka hati melakukan perpindahan jalur niaga kemanapun tanpa harus melakukan transit di Malaka.[6]

Rute dagang Muslim Asia adalah Samudera Pasai menuju ke Malaka. Dengan pembagian dua rute lagi saat tiba di Malaka yakni dapat melalui Malaka-Banjar-Demak dan Malaka- Gresik-Demak. Dua jalur lagi akan dibentuk dari Demak yaitu arah ke Makasar dan ke arah Ternate Tidore.[7] Namun sejak dikuasainya Malaka oleh Portugis, para pedagang muslim banyak melakukan pengalihan perniagaan menuju Aceh. Alih-alih merasa puas dengan penguasaan Malaka, Portugis justru terus melakukan penyerangan serta menekan wilayah Aceh untuk dapat dikuasainya.[8]

Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri tahun 1516 M dibawah kekuasaan Ali Mughayat Syah berupaya melakukan penggabungan wilayah dengan kerajaan-kerajaan kecil di Pantai Utara Sumatera untuk menjadi satu tim dalam melumpuhkan Portugis. Nyatanya tekad Ali untuk melakukan itu harus gugur sebab kerajaan-kerajaan kecil tersebut malah memberikan kesempatan dan peluang bagi Portugis. Kekuatan yang dimiliki Aceh saat itu cukup kuat sehingga mampu memukul mundur Portugis dari wilayah Aceh sehingga pada 1521 M Ali dapat

[5] Pribadi, "ERA NIAGA DI NUSANTARA PADA MASA KERAJAAN ISLAM +1500-1700 M."

[6] Pribadi.

[7] Aisyah Syafiera, "PERDAGANGAN DI NUSANTARA ABAD KE-16," *Jurnal Avatara* 4, no. 3 (2016).

[8] Arif Rahman, "Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara Pada Abad 16-18 M," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (September 9, 2021): 1333–44, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.21894.

menumpas pasukan Portugis dibawah pemimpinnya bernama Jorge de Brito. Kekalahan yang diterima Portugis menjadikan Aceh terlepas dari cengkaraman Portugis serta dapat menguasai wilayah kecil di Pantai Utara Sumatera dapat ditaklukan sehingga Deli, Daya, Pasai, dan Pidir masuk dalam daerah kekuasaannya.[9]

Perkembangan wilayah kekuasaan Aceh diikuti dengan berkembangnya pasar-pasar di Aceh serta pelabuhan Aceh yang menjadi tempat singgah dari kapal-kapal yang datang. Hal ini tentu memberikan peluang besar karena kejatuhan Malaka membuat rute perniagaan yang awalnya melalui Malaka maka banyak dipindah melalui Selat Sunda.[10] Sehingga perubahan jalur perniagaan yang dipindah dari Laut Merah, Kairo dan Laut Tengah digeser menjadi Laut Merah, Mesir dan Mediterania. Jalur ini dibuat sebagai upaya menyaingi kekuatan Portugis.[11]

Keberhasilan Aceh membuka kembali jalur perniagaan merica pada tahun 1538 M yang sempat mengalami pemberhentian ekspor merica ke Timur Tengah melalui Laut Merah membuat Aceh dapat menjual lada setiap tahunnya sebanyak 20 kapal. Kemudian, Aceh mampu mengirim stok lada dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan Eropa melalui Laut Merah pada tahun 1550.[12] Menurut catatan yang ditulis oleh Jorge de Lemos, Aceh mampu melakukan ekspor besar-besaran berbagai jenis rempah serta perhiasan melalui Laut Merah sehingga Aceh juga melakukan ekspor melalui kapal-kapal dari Gujarat sebanyak 40.000-50.000 kw rempah-rempah per tahun, Dari seluruh rangkaian perniagaan di Laut Merah, Aceh Darussalam dapat meraup keuntungan sebesar 4 juga dukat emas per tahun.[13]

Jendral Augustin De Beaulieu menyebutkan bahwa kapalnya singgah di Aceh tepatnya di Pelabuhan Labo atau Nalabo (Meulaboh) pada tahun 1621. Beliau menjelaskan bahwa saat itu pelabuhan Meulaboh sangat ramai disinggahi oleh kapal-kapal dan pedagang asing.[14] Pelabuhan Aceh dikunjungi oleh pedagang dari Arab, India, Turki, Persia, dan Abbysinia. Aceh banyak didatangi pedagang asing dari Konstantinopel, Gujarat, Coromandel, Mallabar, Laut Merah, dan berbagai daerah lainnya. Ada juga dari Semenanjung Malaya sampai Jawa.[15] Sementara itu, kapal-kapal yang berasal dari Inggris mendatangi Pelabuhan Aceh menggunakan

[9] Ali Hasjmy, *59 Tahun Aceh Dibawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
[10] Syafiera, "PERDAGANGAN DI NUSANTARA ABAD KE-16."
[11] Taslim Batubara, "Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar: Sang Penakluk dari Kesultanan Aceh Darussalam," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Jurkam)* 1, no. 1 (2020): 1–6.
[12] Batubara.
[13] Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi and Gunawan Adnan, *The History of Aceh: Mengenal Asal-Usul Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh*, Cetakan kedua (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2020).
[14] Al-Asyi and Adnan.
[15] Rahman, "Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara Pada Abad 16-18 M."

kapal-kapal kecil yang dibuat di Asia namun bergaya Eropa dengan ukuran sebesar 80-150 *lasten* (1 *last* seberat 2.000 kg; jika 70 *lasten* maka muatan kapal mampu mencapai 140 ton). Sedangkan untuk kapal-kapal yang berasal dari India-Arab datang dengan ukuran 100-170 *lasten*. Kapal yang datang dari Kedah dan Melayu berjenis kapal *Ghurap, Wankan,* dan *Gonting.*

Apabila dilihat dari wilayahnya, posisi Aceh masih sulit untuk dilalui sehingga kebanyakan kapal-kapal asing yang datang memilih untuk menghindarinya. Teluknya dijaga oleh beberapa pulau seperti Pulau Waih, Breueuh, dan Bunta. Teluk tersebut dapat dilewati melalui 3 terusan yakni terusan surat (akan sampai Gujarat), terusan Bengali (dapat berlabuh ke pantai India), dan ada satu terusan lagi yang menghubungkan dengan Malaka.[16]

Pelaut Beaulieu mengisahkan perjalanannya yang harus ditempuh lagi sekitar 8 hari untuk sampai daratan walaupun sudah berhasil melewati terusan yang penuh dengan angin dari tenggara yang membuat kapalnya harus kehilangan satu jangkar. Muara sungai di Aceh itu tepinya menjorok ke hulu dan memiliki ambang sungai yang berbahaya ditambah karang-karang yang memecah gelombang laut.[17] Jalur utama yang digunakan hanya dapat melalui sungai, sehingga bongkar muat barang dari kapal besar tidak bisa dilakukan dan harus dipindahkan menggunakan kapal kecil.[18]

Masyarakat Aceh pada saat sekitaran abad 16 memiliki mata pencaharian beragam mulai dari sebagai nelayan yang menjadi peringkat pekerjaan paling menjanjikan apalagi ketika cuaca baik, maka akan ditemukan 8-10 kapal yang berisi jaring-jaring besar.[19] Lalu ada yang bercocok tanam untuk menghidupi keluarganya. Mereka menanam padi (padi yang ditanam ada dua jenis yakni basah dan kering) dan lada sebagai tanaman pokok, selain itu, mereka juga menanam pohon buah, pohon kelapa, dan pohon pinang. Hal ini juga erat kaitannya dengan perniagaan dari hasil tanam mereka sendiri. Bukan hanya itu, mereka juga ada yang bekerja sebagai tukang kapal karena sesuai dengan kondisi Kesultanan Aceh yang hanya bisa dilewati melalui sungai-sungai penghubung.[20]

Aceh juga memiliki banyak pandai emas dan besi yang lihai dalam berbagai macam pembuatan barang seperti keris, pisau, mata lembing, dan berbagai perlengkapan dari kuningan seperti kandil dan lampu bokor serta berbagai desain baju yang dilapisi berbagai pernak-pernik dan kancing dari emas untuk sang Raja.[21]

---

[16] Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Cet. ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

[17] Lombard.

[18] Lombard.

[19] Lombard.

[20] Zumrotul Muhzinat, "Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda," *Jurnal Tsafaqoh dan Tariqh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 5, no. 2 (2020).

[21] Lombard, *Kerajaan Aceh*.

Kekayaan Emas Aceh tempo dulu menjadi tersohor di kalangan Eropa sampai menyebut Aceh sebagai *Aurea Chersonese* atau *Golden Chersonese.*[22]

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah[23] yang terdiri dari 4 tahapan. Tahapan tersebut ialah heuristik dimana proses pengumpulan sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian berupa buku, jurnal, dan naskah. Kemudian berlanjut pada tahapan kritik dengan memilah dan mendalami sumber-sumber yang didapatkan secara kritis. Setelah dilakukan kritik, maka selanjutnya ialah tahapan interpretasi dengan melakukan penafsiran berbagai fakta-fakta yang ditemukan untuk dapat dikaitkan satu dengan lainnya dan historiografi[24] sebagai tahapan akhir dalam menuliskan dan merekontruksi suatu peristiwa sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai dengan fakta sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Raja-raja yang memiliki kuasa atas suatu wilayah banyak meraup keuntungan dari perniagaan apalagi perniagaan jalur maritim yang tentu banyak menghasilkan pundi-pundi keuntungan dari penarikan pajak, bea cukai, hadiah, bahkan raja-raja juga melakukan permainan saham dengan menyimpan modal di para syahbandar atau mengutus para saudagar untuk berdagang ke wilayah lain dengan sistem *partnership*.[25]

Kesultanan Aceh menerapkan sistem monopolistik yaitu semua yang diperoleh orang kaya pada akhirnya harus tetap diserahkan kepada Kesultanan/Istana.[26] Monopoli yang dilakukan oleh Aceh dalam hal perniagaan adalah dengan membuat struktur perniagaan dari berbagai sumber, seperti pajak yang ditarik dari setiap kepala lokal yang mengelola perkebunan atau hasil hutan di Aceh, selain itu Raja juga memiliki kebun sendiri seperti perkebunan lada di pedalaman hak milik pribadi raja.[27]

Setiap wilayah yang menjadi sebuah pusat perniagaan baik itu hanya sebagai wilayah transit maupun wilayah besar penghasil komoditas tentu memiliki peraturan yang diatur sedemikian rupa oleh penguasa wilayahnya. Peraturan tersebut meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan perniagaan, pajak, bea cukai, sampai teknis dalam pelayaran, berbagai hal tersebut dilakukan untuk mengatur dan

[22] Al-Asyi and Adnan, *The History of Aceh*.

[23] Aditia Muara Padiatra, *Ilmu sejarah : metode dan praktik* (Gresik: CV. Jendela Sastra Indonesia Press, 2020).

[24] Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013).

[25] Syafiera, "PERDAGANGAN DI NUSANTARA ABAD KE-16."

[26] Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia et al., eds., *Kumpulan Tulisan Seminar Sejarah Nasional Tahun 2017* (Seminar Sejarah Nasional, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017).

[27] Muhzinat, "Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda."

mengikat setiap pihak yang terlibat dalam perniagaan untuk bisa bekerja sama tentunya hal ini juga berimbas pada keuntungan besar yang akan diperoleh oleh semua pihak terutama penguasa wilayah.

Kesultanan Aceh Darussalam juga melakukan hal serupa demi memperkuat ekonomi dan penguatan wilayah niaga, Aceh banyak mengadopsi undang-undang yang berlaku di Malaka. Kunjungan Laksamana Cheng Ho juga memberikan gambaran betapa peraturan di Aceh menyerupai Malaka.[28] Hal ini terlihat dari kesamaan mengenai alur bongkar muat kapal asing di wilayah Aceh dan Malaka. Barang yang diturunkan dari kapal akan ditentukan harganya oleh *syahbandar* (ketentuan harga harus sesuai yang sudah ditetapkan, tidak ada tawar menawar) beserta jumlah bea cukai yang harus dibayar, namun banyak pedagang yang melakukan suap ke *syahbandar* supaya bea cukai barangnya rendah saat melakukan pembayaran di bagian bendahara. Setelah pembayaran bea cukai, maka pedagang baru boleh menemui wazir sultan. Satu hal lagi, setiap kapten kapal dilarang berniaga, apabila melanggar, maka akan dituntut di Pengadilan.[29] Adapun ketentuan yang berkaitan dengan pedagang asing yakni orang Inggris dan Belanda membayar pajak sebanyak 7% dari harga barang yang diturunkan dari kapal, mereka membayarnya dalam bentuk barang. Kemudian untuk orang India dikenakan pajak sebesar 5%. Namun, para pedagang Muslim membayar pajak menggunakan emas untuk besarannya beberapa sumber menyebutkan bahwa pajak pedagang muslim lebih rendah.[30]

Aceh juga menerapkan beberapa kebijakan perniagaan yang dilakukan seperti adat cap (cap yang digunakan sebagai tanda izin untuk berlayar) cap ini dapat dibeli dengan cara ditukar dengan barang ataupun uang. Kemudian, ada adat kain yang diberikan untuk istana. Adat memohon kunci hal ini dilakukan sebagai permohonan agar dapat menurunkan barang-barang dari kapal apabila sudah selesai mengurus administrasi dan pajak. Ada juga hadiah langgar sekitar 120 *tahil* ini dibayarkan sebagai syarat izin berlabuh. Serta terdapat adat mengawal yakni kewajiban yang diberikan kepada bangsa Aceh yang bertugas menjaga kapal saat kapal tersebut bersandar di perairan Aceh.[31]

Para pedagang dan pengusaha besar tidak perlu khawatir merugi sebab Aceh menganut sistem pasar sehingga aktivitas perniagaan terjadi dalam satu titik wilayah sehingga memudahkan pengusaha untuk meraup keuntungan lebih besar menarik pelanggan dan tentunya memudahkan pelanggan untuk mendapatkan

[28] Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia et al., *Kumpulan Tulisan Seminar Sejarah Nasional Tahun 2017*.

[29] Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia et al.

[30] Anthony Reid, *Dari ekspansi hingga krisis : jaringan perdagangan global Asia Tenggara 1450-1650*, ed. RZ Leirissa (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1999).

[31] A. B. Lapian, *Pelayaran Dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 Dan 17*, Cet. 1 (Depok: Komunitas Bambu, 2008).

barang yang dicari. Selain itu, Aceh juga menyediakan koperasi sebagai tempat simpan pinjam bagi pemodal, namun ini juga dapat digunakan untuk masyarakat luas dengan margin maksimal 1%/bulan atau 12% dalam satu tahun. Hal ini tentu lebih murah dibandingkan dengan margin Banten yang mencapai 5%/bulan.[32]

Melalui pembentukan pola dagang untuk mengawasi perniagaan dan komoditasnya Aceh melakukan pengangkatan para jabatan yang menjabat dalam berbagai tugas. Diantara pejabat-pejabat tersebut ialah *Keujreun Blang* (yang memiliki fungsi untuk meakukan pengaturan komoditas pangan seperti sistem penanaman padi), *Panglima Laot* (mengawasi dan mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan nelayan dan perikanan termasuk sengketa yang di laut), *Peutua Seuneubok* (menaungi kegiatan yang berkaitan dengan tanaman dan pembebasan lahan berbagai komoditas rempah seperti lada), serta peran utama dalam perniagaan jalur maritim ialah seorang *Syahbandar* yang bertugas sebagai kepala pasar yang mengatur segala transaksi dan jual beli yang terjadi di pasar. Hal ini berlaku untuk pasar di pedalaman maupun pesisir. Dalam mengatur urusan administrasinya, Aceh memilki dua embaga tinggi yakni *Balai Furdhah* sebagai kantor pusat perniagaan, kantor ini berada dibawah pengawasan dari wazir urusan perniagaan dan Balai Laksamana sebagai markas besar tentara darat dan laut. Serta ada juga *Baitul Maal* sebagai kantor pusat bendahara negara.[33]

Berbagai sumber keuangan negara yang dihimpun di *Baitul Maal* berasal dari Zakat, *Jizyah* (pajak bagi penduduk luar muslim), *Kharraj* (pajak yang didapatkan dari keuntungan hasil bumi dan pertanian dari penduduk yang beragama diluar Islam), *Asyur* (bea cukai dari barang dagangan yang masuk ke Aceh), serta berbagai keuntungan yang ditetapkan bagi para pengusaha di Aceh.[34] Para petinggi kerajaan seperti *Uleebalang* akan mendapatkan pendapatan yang berasal dari denda-denda atas kesalahan rakyat, sebanyak 1% dari harga sawah yang dijual oleh masyarakat, pajak perahu yang memasuki sungai 5% untuk dagangan dari wilayah asing sedangkan 2% bagi yang membawa barang-barang lokal, dan berbagai kebijakan lain yang menyangkut dengan pembayaran transaksi.[35]

Di Pelabuhan *Aetchin* (Aceh) para pedagang menjual kebutuhan yang beraneka ragam seperti lemari, laci, peti, sampai beragam macam permainan.[36] Selain itu, kapal Batavia yang datang membawa barang dagangan berupa berupa getah kamboja dan gong tembaga yang berasal dari Cina. Sedangkan barang yang

[32] Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia et al., *Kumpulan Tulisan Seminar Sejarah Nasional Tahun 2017*.

[33] Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam sejarah* (Jakarta: Benua, 1983).

[34] Hasjmy.

[35] Agus Budi Wibowo and Faisal, *Kepemimpinan Tradisional Di Indonesia: Aceh Besar Dan Kajang*, Cetakan pertama (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

[36] Pribadi, "ERA NIAGA DI NUSANTARA PADA MASA KERAJAAN ISLAM +1500-1700 M."

berasal dari Pegu ada beras, ikan asin, Gentong Martaban, getah dengan harga jual 30-42 ringgit, dan gong Pegu. Selain itu, orang-orang Bengali juga datang ke Aceh untuk menjual beras, mentega yang dijual dengan harga 16-20 ringgit/poci, kain sutera dibandrol dengan harga 90-100 ringgit/kodi, dan kain-kain lainnya.

Aceh memiliki komoditas asli pribumi berupa hewan ternak, daging, ikan, beras, dan buah-buahan. Namun komoditas ini tidak terlalu laku keras di pasaran.[37] Sedangkan, komoditas yang laku di pasaran ialah lada, sutera, kapur barus, kendi, batu bara, kayu, sulfur, minyak tanah, emas, timah, damar, rotan dan gading.[38] Walaupun begitu, Aceh tetap melakukan ekspor kayu cendana, sapan, gandarukem (resin), damar, getah perca (laban), obat2an dan pardum seperti kemenyan putih dan hitam, kapur, pucuk, rasmala, bunga lawang, lada gading, lilin, tali sabuk dan sutera.[39]

Aceh mengimpor barang dari Eropa dan Amerika berupa kain-kain (idja tjek) dan belatju, baju kaos, tali pinggang kulit dan sebagainya sedangkan dari tanah Persia dan Arab didatangkan barang berupa kain sutera, kurma, ikan kering, minyak sapi, kitab-kitab, minyak atar, mani-manik permata, dan lain sebagainya. Benggala juga ikut melakukan ekspor dagangan ke Aceh dengan menjual kurma, minyak sapi, ketumbar, kain selendang, benang mentah, dan sebagainya. Aceh mengimpor barang dagangan dari Cina berupa kain sutera, tembikar, piring, mangkuk, gula, obat-obatan dan sebagainya. Dari Siam ada selimut dan ikan kaju. Dari Manila ada tembakau serta besi untuk alat perang serta gula pasir dari Jepang. Beberapa guci, gula, sakar lumat, minyak barang, biji besi, besi upam, anggur, kurma, timah putih hitam, besi lantak, kain cinde dari Gujarat.[40]

Dalam melakukan transaksi niaga tentu berkaitan dengan mata uang yang berlaku pada saat itu. Kesultanan Aceh Darussalam menerapkan ketetapan mata uang yang dipakai disetiap pasar, pelabuhan, dan bandar dagang yang berada di wilayah kekuasaannya dengan menggunakan berbagai mata uang. Adapun mata uang tersebut ialah *drama* (koin kecil emas), *cash* (timah), *kupang* (perak), *kepeng* (tembaga), *keuh* (timah), dirham (emas 18 karat). [41] Beberapa catatan juga menyebutkan bahwa mata uang-mata uang tersebut lebih dikenal dengan uang emas *(deureuham),* uang perak *(kupang),* dan uang timah *(keueh).*[42] Selain itu, ada mata uang yang terbuat dari tembaga (*duet)* dengan ciri khas salah satu sisinya terdapat tulisan Arab empat, dua dan satu kepeng, mata uang in dikenal dengan *duet* (duit),

[37] Muhzinat, "Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda."

[38] Rahman, "Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara Pada Abad 16-18 M."

[39] Rahman.

[40] Rahman.

[41] Intan Devi Orlita Sari, "Perekonomian Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam," *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan* 8, no. 2 (July 23, 2022): 146–54, https://doi.org/10.29408/jhm.v8i2.5248.

[42] Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam sejarah*.

ukurannya sama seperti ringgit meriam. Namun, pengusiran terhadap orang Portugis di Aceh menyebabkan mata uang *duet* juga hilang dan tidak digunakan lagi.[43]

Jika dilihat dari setiap masanya orang berniaga di Aceh, orang-orang Cina kebanyakan menggunakan *ketun* untuk melakukan transaksi di Aceh, sedangkan bangsa Portugis memiliki uang tersendiri yang akrab dikenal dengan *ringgit spanyol*. Justru *ringgit spanyol* inilah yang menjadi mata uang kesatuan di semua wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam karena *ringgit spanyol* nilainya setara dengan 4 *deureuham Aceh*. Sedangkan mata uang lainnya apabila dikonverksi akan terlihat bahwa 1 *kipang* bernilai 1.600 *cash*, jadi 3 *kupang* seharga dengan 1 *deureuham*.[44]

Mata uang tersebut berlaku secara umum dan dapat digunakan untuk bertransaksi appaun di Aceh, lain halnya dengan transaksi lada. Aceh memiliki ketetapan tersendiri yakni menggunakan reyal atau *rieuyeu* untuk mengukur harga lada dan menggunakan satuan bahar untuk timbangannya yang mana 1 bahar setara dengan kurang lebih 3 pikul lada. Lada yang dijual di Aceh mengalami kenaikan harga semula sebelum datangnya Belanda, lada dijual diangka 8 riyal/bahar. Pada saat Inggris datang ke Aceh, harga lada mencapai 20 riyal/bahar dan terus mengalami kenaikan harga sampai menyentuh angka 48 riyal/bahar pada saat Prancis mulai datang.[45]

Untuk harga pasaran di Aceh sangat bervariasi, seperti kain Guinea dibandrol dari harga 60-100 ringgit/kodi, kain Coromandel menjadi kain favorit yang dijual dengan harga 50-90 ringgit dan naik hingga 115 ringgit/kodinya, dan pedagang beras yang menjual barang dagangannya sebesar 30-60 ringgit. Komoditas beras menjadi makanan pokok, namun harganya akan menyesuaikan dengan stok barang, jadi sewaktu-waktu harga beras dapat melambung tingi dan dapat juga dibeli dengan separuh harga saat stoknya melimpah. Waktu terbaik untuk membeli beras adalah pada bulan Desember dan Januari.

Dalam kestabilan perniagaan tentu hal ini bergantung pada setiap Sultan/ah yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, mereka memiliki perbedaan dalam menetapkan kebijakan, diplomasi, serta peraturan yang mengikat secara khusus antara *syahbandar*, pedagang asing, maupun pribumi dan komoditas perniagaan.

Pada masa Sultan Al-Mukammil, Kesultanan Aceh kedatangan Cornelis dan Frederick de Houtman dari Belanda yang singgah di Aceh dan menimbulkan pertikaian sehingga menewaskan 95 orang termasuk Cornelis, sebagai gantinya Frederick menjadi tawanan Istana untuk menebus keselahan awak kapalnya yang

[43] Sudirman, *Deureuham Aceh: mata uang emas tertua di Nusantara* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2018).

[44] Sari, "Perekonomian Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam."

[45] Sudirman, *Deureuham Aceh*.

mengingkari janji atas perjanjian kapal lada.[46] Menindak lanjuti hal tersebut, Print Maurits mengutus Gerard de Roy dan Lourens untuk menyampaikan permohonan maaf atas tragedi yang terjadi disertai dengan permohonana kerjasama hubungan dagang serta pembebasan atas Frederick.[47] Sesampainya di Aceh, rombongan tersebut disambut Laksamana Malahayati dan menerima hukuman atas ganti rugi yang disebabkan oleh Paulus van Caerden yang berhasil membawa kabur kapal lada miliki Aceh, mereka harus menebus kesalahan Paulus sebesar 50.000 gulden supaya dapat menemui sultan.[48]

Ketegasan dan penguatan wilayah atas pelanggaran yang terjadi merupakan cerminan bahwa Kesultanan Aceh pada saat itu tidak pernah main-main dengan peraturan yang berlaku. Tidak hanya itu, kemurahan serta kearifan hati Al-Mukammil yang tetap membuka hubungan kerjasama dengan merespon surat beserta penugasan tiga orang utusannya beranama Sri Maharaja Laksamana Muhamad, orang Kaya Mangkubumi Abdul Hamid, dan orang Kaya Indra Wangsa Amir Hasan membuat hubungan Aceh-Belanda semakin membaik.[49] Semasa pemerintahannya, Sultan Al-Mukammil menerima kunjungan dagang dari kapal Inggris yang dinahkodai oleh Sir Henry Middleton, utusan dari Lancaster yang menggunakan kapal susan. Dalam kunjungannya, Sultan mengizinkan kapal Inggris itu untuk berdagang dan membeli lada namun tetap mematuhi tata krama dan adat yang berlaku di wilayah Aceh terutama untuk menghindari perzinahan di wilayah Aceh.

Hal yang sama dilakukan oleh Sir James Lancaster seorang utusan dari Inggris *(East India Company)* yang berangkat menuju Aceh untuk menyampaikan bingkisan berupa jin zamrud dan surat perjanjian Ratu Elizabeth kepada Sultan Aceh. Ia sampai di Pelabuhan Aceh pada 29 Mei 1602 dan segera menemui Sultan.[50] Suratnya berisi kontrak perjanjian emas dan lada serta bantuan persenjataan lengkap.[51] Kedatangannya mendapat sambutan hangat. Beliau menetap di Aceh sampai bulan Oktober 1602 untuk melakukan hubungan dagang dengan para pedagang di Aceh. Adapun beberapa perjanjian yang disepakati dalam surat tersebut berupa kebebasan bea cukai barang-barang Inggris yang masuk ke wilayah Aceh dan diberikan keleluasaan dalam penentuan harga jual sehingga tidak

[46] Gusti Asnan, *Dunia Maritim pantai barat Sumatera* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007).

[47] T Ibrahim Alfian, *Mata uang emas kerajaan-kerajaan di Aceh* (Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1979).

[48] Saifullah Saifullah, *Laksamana Keumalahayati* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012).

[49] Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam sejarah*.

[50] M. Adnan Amal and M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Maluku Utara, 1250-1950*, Cet. 1 (Ternate: Kerja sama Gora Pustaka Indonesia, Nala Cipta Litera, dan Bursa Kawasan Timur Indonesia, 2007).

[51] Lombard, *Kerajaan Aceh*.

mengikuti patokan Kesultanan Aceh serta apabila ada hal-hal tak terduga terjadi yang berkaitan dengan masyarakat Inggris maka harus dibebaskan, tidak boleh dipermalukan.[52]

Kemajuan perniagaan dapat dilihat dari penguasaan wilayah Minangkabau sebagai daerah penghasil emas atau tambang emas, hal ini menyebabkan kekayaan besar bagi Aceh sendiri terutama Sultan Iskandar Muda yang sempat memiliki seratus bahar emas. Emas-emas dari Minangkabau dikirim ke Aceh melalui Pelabuhan Tiku dan Pariaman.[53] Upaya yang dilakukan oleh Iskandar Muda meliputi penguasaan wilayah dan seluruh pelabuhan yang berada di sekitaran Selat Malaka dan menguatkan pondasi agar wilayah-wilayahnya tidak mudah terpecah belah oleh pengaruh asing hal ini ia lakukan dengan melakukan cara mufakat dengan masing-masing kepala wilayah jika tidak berhasil, maka ia menempuh jalur kekerasan, memukul mundur negeri-negeri sebelah timur yang menyebabkan kerugian atas perniagaan di Aceh, melakukan kenaikan harga dari hasil bumi serta mengawasi perputaran komoditas rempah untuk menghindari kerugian.

Sultan Iskandar Muda menetapkan kebijakan ekonomi berupa kenaikan harga jual di pasar dari harga-harga pertanian dan produksi perkebunan. Beliau juga membangun bandar agung serta memperkuat pertahanan dan penjagan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Aceh. Melihat hal ini, Portugis memilih untuk menjauh dari Aceh begitupun dengan Belanda yang mengalihkan sasarannya ke Jawa dan Maluku. Hal ini juga dilakukan Inggris yang mengalihkan perniagaannya walaupun sempat terjadi kerjasama diantara keduanya.[54]

Lebih lanjut, Sultan Iskandar Muda melakukan kenaikan terhadap harga lada di pasaran dan menetapkan kebijakan bahwa yang ingin membeli lada harus datang dan memakan langsung.[55] Sultan Iskandar Muda menerapkan sistem sentralistik utnuk menghindari perniagaan dengan Eropa di Jayakarta. Sehingga beliau memerintahkan untuk menebang pohon pala dan cengkeh di Kedah dan melakukan pemusatan dua komoditas tersebut di Tiku dan Pasaman dan hanya dapat dijual di Kotaraja saja dengan harga sesuka hati Sultan. Tahun 1618-1619, Aceh mampu menguasai dan menaklukan Pahang disusul Kedah dan Patani sebagai daerah penghasil lada.[56]

Sedangkan hal berbeda dialami oleh Sultanah Safiatuddin saat memerintah Aceh, beliau mengalami masalah besar pada saat perusahaan tambang emas mulai dibangun kembali di Geumpang (Pidie) sepanjang 100 KM yang mana didalamnya terdapat emas urai yang banyak diperjual belikan kepada orang Belanda (VOC).

[52] H. Mohammad Said, *Aceh sepanjang abad* (Medan: Harian Waspada, 2007).

[53] Anthony Reid and Mochtar Pabotinggi, *Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450-1680 : Jilid 1 Tanah dibawah Angin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

[54] Muhzinat, "Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda."

[55] Muhzinat.

[56] Ismail Suny, *Bunga rampai tentang Aceh* (Jakarta, 1980).

Belanda ingin menjual emas urai hanya untuk dirinya sendiri namun ratu tetap memiliki kebijakan tegas bahwa emas urai tersebut dapat dibeli oleh semua bangsa tanpa terkecuali dan penjualan tersebut harus berada di bawah penguasaanya bukan melalui VOC. VOC menempuh berbagai cara untuk dapat menghentikan perniagaan bebas, namun hal tersebut tidak dapat membuatnya menang lantaran pasukan Aceh sangat kuat pada saat itu. Selain di Pidie, tambang emas juga dibuka di sebelah barat Aceh di sungai Meulaboh, penghasilan dari sungai ini dibawa ke Aceh dan diperniagakan dan pada masa ini pula perniagaan maritim melalui bandar Pulau Penang sudah terbuka. Mulai saat itu perniagaan emas mulai berpindah ke Penang.

Tidak hanya emas, timah yang merupakan komoditas utara dari wilayah Perak yang masuk dalam kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam juga tidak luput dari perhatian dan incaran pihak VOC, hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jenderal Belanda Antonie van Dieman (1636-1645) yang mengutus pasukan dibawah pimpinan Adnold de Vlamingh van Outschoorn dan Jan Harmanzs untuk mendesak sultanah agar selalu melakukan pengiriman timah ke Belanda, tentu ini langsung ditolak secara halus oleh Safiatuddin atas dasar prinsipnya bahwa setiap komoditas yang ada di wilayah Aceh merupakan komoditas yang bebas diperjualbelikan kepada siapapun dan Safiatuddin juga memberikan kebebasan secraa khusus pada umat Islam yang ada di India untuk dapat berniaga timah di Aceh dan Semenanjung Melayu.[57]

Gubernur Jendral yang baru yakni Cornelis Van der Lijn mengutus Truijtman untuk mengirimkan surat kepada Sultanah Safiatuddin yang berisi mengenai permintaanya untuk dapat membeli timah di Perak seperti Portugis, namun sultanah membalas surat tersebut sesuai dengan prinsip perniagaan bebas yang diterapkan. Aceh hanya dapat memanfaatkan sebanyak 600 bahar (jumlahnya lebih kecil dibandingkan permintaan Belanda). Kemudian, Belanda melakukan balas dendam dengan menghasut wilayah bawahan Aceh untuk melakukan pemberontakan terhadap Sultanah Safiatuddin sehingga banyak wilayah yang melepaskan diri dari Aceh dan kekuatan pasukan semakin melemah. Peristiwa ini menjadikan Safiatuddin tidak memiliki banyak pilihan dan terpaksa menandatangani perjanjian timah di Perak.[58]

Walaupun demikian, Safiatuddin bersama dengan Muzafar Syah II selaku raja di Perak terus melakukan pemantauan dan monopoli ketat dibelakang Belanda. Pembakaran tanaman milik Belanda yang dilakukan oleh Perak membuat Belanda meradang dan Sultanah Safiatuddin turun tangan untuk menyelesaikan masalah

[57] Rd Siti Sa`adah, "Ratu-Ratu Aceh Abad ke-17 M: Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kekuasaan," *Al Turats* 13, no. 2 (2007).

[58] Pocut Haslinda Syahrul, *Perempuan Aceh dalam lintas sejarah dari abad VIII - XXI*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pelita Hidup Insani, 2008).

tersebut. Sultanah Safiatuddin berkirim surat kepada Gubernur Jendral Belanda yang baru yakni Joan Maetsuyker untuk meminta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan timah di Perak antara Aceh dan Belanda dengan baik-baik hal ini bertujuan supaya Belanda tidak melakukan penyerangan terhadap Aceh.[59]

Hal ini diperparah dengan dilaksanakannya pengadilan yang dilakukan oleh VOC di wilayah Perak tanpa sepengetahuan Safiatuddin, hal ini menjadi pemantik amarah Sultanah untuk menghukum VOC karena mau bagaimanapun Perak masih berada dalam tanggungjawab kekuasaannya. sehingga selama 3 tahun kapal-kapal Belanda dilarang untuk berniaga di pantai Barat Sumatera dan hubungan keduanya memburuk. Namun, beberapa hal lain terjadi, VOC melakukan perintah kepada Perak untuk menutup semua akses pedagang yang akan masuk wilayah Perak dan mencegah Perak melaporkan hasil keuangan tahunan kepada Safiatuddin. Sultanah melakukan pengangkutan seluruh timah di Perak. Belanda akhirnya menyerah dengan menutup kantor dagangnya di Perak pada tahun 1663.[60]

Walaupun menghadapi situasi yang rumit dibawah tekanan besar dari Belanda terhadap monopoli timah di Perak, namun Sultanah Safiatuddin selalu memastikan bahwa orang kaya tetap memiliki timah serta kegiatan perniagaannya dilindungi, sehingga para orang kaya tersebut tetap memberikan upeti kepada Sultanah. Selain itu, sistem barter ditetapkan oleh Sultanah dengan menukar pembayaran kain-kain dari Gujarat menggunakan timah yang berasal dari Perak.[61]

Kerjasama Inggris-Aceh sempat terjadi pada masa Al-Mukamil (kakeknya Iskandar Muda) namun kesepakatan tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga kedatangan Thomas Best pada tahun 1613 menandakan kesepakatan baru yang akan dijalin, beliau mendatangi Aceh menggunakan kapal Dragon dan Hosiander dengan membawa banyak hadiah serta surat dari Raja Inggris saat itu Raja James I, surat tersebut berisi permohonan izin dagang dengan imbalannya persenjataan berupa kereta, meriam, pelor dan beberapa tong mesiu yang dijanjikan Inggris lewat pembuktian datangnya kapal yang dinahkodai oleh John Millward pada 1615.[62]

Namun dalam kesepakatan tersebut kebebasan berdagang, pajak, bea cukai, serta perlindungan sudah tidak bisa disepakati lagi, Sultan hanya memberikan kebebasan pada hak atas tawanan karang dan hak raja atas warisan jika ada

[59] J.A Van Der Chijs, "Dagh-Register: gehonden int Casteel Batavia 1640-1641" (Vereenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oostindische Compagnie (VOC), n.d.), Arsip Nasional Republik Indonesia.

[60] Khairul Nizam Bin Zainal Badri, "The Authority of the Queen of Aceh and the Sultan of Perak in Tin Trade Negotiations with the Dutch 1640-1670," *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 4, no. 2 (June 7, 2021): 143–50, https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.32842.

[61] Sher Banu A Latiff Khan, "Rule behind the Silk Curtain: The Sultanahs of Aceh 1641-1699" (Unpublished Dissertation, England, Queen Mary. College, University of London, 2009).

[62] Sudirman Sudirman, *Banda Aceh dalam siklus perdagangan Internasional 1500 - 1873* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009).

penduduk Inggris yang meninggal dunia di Aceh.[63] Beliau hanya mengizinkan pedagang Inggris untuk berniaga di Aceh karena jika berdagang di Pariaman dan Tiku dikhawatirkan banyak hal yang tak terduga sehingga prajurit Aceh akan sulit menolong karena lokasinya yang jauh dari ibukota Aceh.[64] Sultan juga tidak mengizinkan Inggris untuk mendirikan kantor dagang di Aceh.[65]

Saat permintaan di Eropa terus meningkat sehingga harga lada kian melambung tinggi hal ini berdampak baik kepada kas negara yang semakin membesar pendapatannya. Sehingga sejak 1623 Aceh tercatat sebagai bandar perniagaan lada internasional, lada-lada tersebut berasal dari Aceh, Aru, Jambi, dan Malaya. Sultan Iskandar Muda juga melakukan hubungan dagang dengan Sultan Parsi, Mesir, Turki, Inggris dan raja-raja India. Beliau berhasil mendapatkan bantuan berupa senjata dari Inggris, Belanda, dan Prancis.[66]

Pada masa Sultanah Safiatuddin, Persatuan Dagang Inggris mengunjungi Banda Aceh Darussalam untuk melakukan perizinan pendirian kantor dagang di Aceh, dan kehadirannya diterima dengan baik oleh Sri Ratu Safiatuddin dengan tangan terbuka. Peraturan dan perjanjian yang dibuat oleh Sri Ratu Safiatuddin hanya berfokus pada keuntungan bagi kerajaannya sehingga dalam hal ini Persatuan Dagang Inggris *(English East India Company)* tidak banyak mendapatkan laba dari perniagaan di Aceh pada saat itu. Hal ini menujukkan bahwa kebijaksanan Ratu masih sangat berarti bagi Aceh karena walaupun perniagaan dengan bangsa lain dilakukan namun kedaulatan Aceh masih dapat utuh tidak terpecahkan.[67]

Hal demikian ditetapkan oleh Safiatuddin supaya Aceh mendapatkan keuntungan lebih besar dalam berbagai kerjasama. Regulasi semacam ini pada akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak terutama Belanda.[68] Belanda merasa dirugikan karena kesenjangan kebijakan ratu yang memberikan keuntungan lebih kepada pedagang dari Gujarat. Menanggapi fenomena itu, Ar-Raniry selaku *Kadi Malikul Adil* memberikan masukan dan arahannya kepada Sultanah Safiatuddin untuk mencabut regulasi tersebut.[69]

Pada masa Sultanah Safiatuddin Aceh kedatangan VOC yang menggeser kehadiran Inggris. VOC membuat perjanjian yang berisi pelarangan kawasan ini untuk berdagang dengan Inggris. VOC juga menjalin kerjasama dagang dengan raja-raja kecil yang merasa tidak puas dengan kerjasama dengan pemerintahan

[63] Lombard, *Kerajaan Aceh*.

[64] Annabel Teh Gallop, "Gold, Silver and Lapis Lazuli: Royal Letters from Aceh in the Seventeenth Century," in *Mapping the Acehnese Past*, ed. R. Michael Feener, Patrick Daly, and Anthony Reed (BRILL, 2011), 105–39, https://doi.org/10.1163/9789004253599_007.

[65] Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam sejarah*.

[66] Suny, *Bunga rampai tentang Aceh*.

[67] Hasjmy, *59 Tahun Aceh Dibawah Pemerintahan Ratu*.

[68] Windi Sekar Sari, "Aceh sebagai Wilayah Terkuat yang Sulit Dijajah Belanda," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 6, no. 2 (2022).

[69] Budi Wibowo and Faisal, *Kepemimpinan Tradisional Di Indonesia*.

Aceh, sehingga ada perjanjian Painan *(Het Painansch Traktaat)* tahun 1663. Hal ini menyebabkan daerah Indrapura, Tiku, dan Padang masuk ke daerah perlindungan Belanda.[70]

Dalam perjanjian painan berisikan bahwa yang membeli lada di Minangkabau hanya boleh untuk Belanda namun dengan syarat tukaran kain yang lebih banyak dan bangsa-bangsa Eropa lainnya dilarang berniaga di pantai Barat Sumatera, hal ini disepakati Ratu dengan berat hati yang kemudian direalisasikan dengan berdirinya kantor dagang VOC di Pulau Cingkuk.[71] Selain perjanjian painan, VOC juga berhasil mendapatkan monopoli pembelian timah di Perak hal ini dikarenakan kekuatan angkatan perang Aceh mulai melemah sehingga Sultanah Safiatuddin terpaksa menandatangi perjanjian tersebut. Aceh sangat dirugikan atas hal ini.[72] Perjanjian tersebut berisi bahwa hanya Aceh dan Belanda yang boleh mengambil timah di Perak, dan Sultan Perak harus mengusir semua pedagang yang datang. Perak, Aceh, dan Belanda menandatangani kesepakatan tersebut pada tanggal 15 Desember 1650.[73] Tahun 1661 Safiatuddin kembali mengirim surat dan hadiah kepada Charles II di Inggris, ia meminta supaya Charles II dapat menjalin hubungan kerjasama dagang yang sempat dibangun agar dapat dipererat kembali seperti pada saat zaman Sultan Iskandar Muda. Inggris diberi kebebasan seluasnya untuk berdagang di Aceh.[74]

Simpulan

Lintasan perniagaan jalur maritim membuat banyak daerah di Nusantara menjadi pelabuhan yang tumbuh dan berkembang. Entah sebagai lokasi transit maupun pasar-pasar besar penghasil komoditas perniagaan. Salah satu pelabuhan besar pada saat itu ialah Malaka yang menajdi penguasaan perniagaan pada abad 15 M, namun kejayaannya harus berakhir dengan perebutan dan jatuh ke tangan Portugis. Hal ini menjadi cikal bakal, Kesultanan Aceh Darussalam dapat menguasai perniagaan karena sejak Malaka berada dalam kekuasaan Portugis, perniagaan jalur maritim berubah dan perniagaan di Laut Merah ini menghasilkan pundi-pundi keuntungan yang didapatkan oleh Kesultanan Aceh.

Hal ini terus berkembang mengingat pergantian sultan dari waktu ke waktu, masing-masing sultan memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur roda perekonomian dan perniagaan yang ada. Hal tersebut terlihat dair berbagai kebijakan mengenai peraturan dagang yang memusatkan perkebunan lada di Tiku

[70] Suny, *Bunga rampai tentang Aceh*.

[71] Gusti Asnan. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2007. Hal 60.

[72] Suny, *Bunga rampai tentang Aceh*.

[73] Badri, "The Authority of the Queen of Aceh and the Sultan of Perak in Tin Trade Negotiations with the Dutch 1640-1670."

[74] Gallop, "CHAPTER VI."

dan Pariaman, pajak pedagang asing sebesar 7% bagi bangsa Eropa dan 5% bagi umat Muslim, pemberlakukan mata uang riyal khusus pembelian lada, dan lain sebagainya. Dengan demikian setiap sultan/ah memiliki kebijakan dan diplomasinya tersendiri dengan terlihatnya diplomasi kuat antar Sultan Al-Mukammil dengan Inggris, penetapan kenaikan harga lada yang diatur sesuka sultan pada zaman Iskandar Muda, serta berbagai konflik penyelesaian mengenai timah di Perak dan emas di Pidie yang melibatkan Sultanah Safiatuddin.

Daftar Sumber

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy, and Gunawan Adnan. *The History of Aceh: Mengenal Asal-Usul Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh*. Cetakan kedua. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2020.

Alfian, T Ibrahim. *Mata uang emas kerajaan-kerajaan di Aceh*. Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1979.

Amal, M. Adnan, and M. Adnan Amal. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Maluku Utara, 1250-1950*. Cet. 1. Ternate: Kerja sama Gora Pustaka Indonesia, Nala Cipta Litera, dan Bursa Kawasan Timur Indonesia, 2007.

Asnan, Gusti. *Dunia Maritim pantai barat Sumatera*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007.

Badri, Khairul Nizam Bin Zainal. "The Authority of the Queen of Aceh and the Sultan of Perak in Tin Trade Negotiations with the Dutch 1640-1670." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 4, no. 2 (June 7, 2021): 143–50. https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.32842.

Batubara, Taslim. "Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar: Sang Penakluk dari Kesultanan Aceh Darussalam." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Jurkam)* 1, no. 1 (2020): 1–6.

Budi Wibowo, Agus, and Faisal. *Kepemimpinan Tradisional Di Indonesia: Aceh Besar Dan Kajang*. Cetakan pertama. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

Gallop, Annabel Teh. "Gold, Silver and Lapis Lazuli: Royal Letters from Aceh in the Seventeenth Century." In *Mapping the Acehnese Past*, edited by R. Michael Feener, Patrick Daly, and Anthony Reed, 105–39. BRILL, 2011. https://doi.org/10.1163/9789004253599_007.

Hasjmy, Ali. *59 Tahun Aceh Dibawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

———. *Kebudayaan Aceh dalam sejarah*. Jakarta: Benua, 1983.

Lapian, A. B. *Pelayaran Dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 Dan 17*. Cet. 1. Depok: Komunitas Bambu, 2008.

Latiff Khan, Sher Banu A. "Rule behind the Silk Curtain: The Sultanahs of Aceh 1641-1699." Unpublished Dissertation, Queen Mary. College, University of London, 2009.

Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh: jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Cet. ke 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Muhzinat, Zumrotul. "Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda." *Jurnal Tsafaqoh dan Tariqh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 5, no. 2 (2020).

Nurmina, U. "Politik Maritim Indonesia Di Selat Malaka (Studi Terhadap Penanganan Permasalahan Piracy)." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Padiatra, Aditia Muara. *Ilmu sejarah : metode dan praktik*. Gresik: CV. Jendela Sastra Indonesia Press, 2020.

Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia, Masyarakat Sejarawan Indonesia, Indonesia, and Universitas Gadjah Mada, eds. *Kumpulan Tulisan Seminar Sejarah Nasional Tahun 2017*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.

Pribadi, Yanwar. "ERA NIAGA DI NUSANTARA PADA MASA KERAJAAN ISLAM +1500-1700 M." *ALQALAM* 22, no. 1 (April 29, 2005): 65. https://doi.org/10.32678/alqalam.v22i1.1448.

Rahman, Arif. "Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara Pada Abad 16-18 M." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (September 9, 2021): 1333–44. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.21894.

Reid, Anthony. *Dari ekspansi hingga krisis : jaringan perdagangan global Asia Tenggara 1450-1650*. Edited by RZ Leirissa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1999.

Reid, Anthony, and Mochtar Pabotinggi. *Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450-1680 : Jilid 1 Tanah dibawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Sa`adah, Rd Siti. "Ratu-Ratu Aceh Abad ke-17 M: Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kekuasaan." *Al Turats* 13, no. 2 (2007).

Said, H. Mohammad. *Aceh sepanjang abad*. Medan: Harian Waspada, 2007.

Saifullah, Saifullah. *Laksamana Keumalahayati*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012.

Sanusi, Anwar. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013.

Sari, Intan Devi Orlita. "Perekonomian Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam." *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan* 8, no. 2 (July 23, 2022): 146–54. https://doi.org/10.29408/jhm.v8i2.5248.

Sekar Sari, Windi. "Aceh sebagai Wilayah Terkuat yang Sulit Dijajah Belanda." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 6, no. 2 (2022).

Sudirman. *Deureuham Aceh: mata uang emas tertua di Nusantara*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2018.

Sudirman, Sudirman. *Banda Aceh dalam siklus perdagangan Internasional 1500 - 1873*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009.

Suny, Ismail. *Bunga rampai tentang Aceh*. Jakarta, 1980.

Syafiera, Aisyah. "PERDAGANGAN DI NUSANTARA ABAD KE-16." *Jurnal Avatara* 4, no. 3 (2016).

Syahrul, Pocut Haslinda. *Perempuan Aceh dalam lintas sejarah dari abad VIII - XXI*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pelita Hidup Insani, 2008.

Van Der Chijs, J.A. "Dagh-Register: gehonden int Casteel Batavia 1640-1641." Vereenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oostindische Compagnie (VOC), n.d. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Wiwik Swastiwi, Anastasia. "Jejak Jalur Rempah Di Kepulauan Riau." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (November 15, 2021). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.251.